

Implementasi Supervisi Akademik Terhadap Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Se Kabupaten Sumedang

Ali Sudin

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan mendasar yang berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan supervisi terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. Hal ini menjadi satu keprihatinan yang perlu disikapi dalam konteks pembelajaran, karena dapat berdampak terhadap rendahnya disiplin dan hasil belajar siswa. Dengan dukungan inilah, PBM di tingkat sekolah dasar secara perlahan tapi pasti dapat ditingkatkan. Berkaitan dengan isu sentral tersebut, penulis mencoba untuk mengidentifikasi mengenai perlunya pelaksanaan supervisi dalam pembelajaran di sekolah dasar yang kemudian dijadikan fokus dalam kajian ini. Secara teoritis, untuk mengoptimalkan PBM di sekolah dasar perlu dilakukan berbagai upaya, baik dari dalam maupun dari luar. Pelaksanaan supervisi adalah salah satu faktor yang dapat mendukung terwujudnya kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasi penyelidikan dengan teknik survey, interview, angket, dan observasi atau dengan tes. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 54 guru sekolah dasar laki-laki dan perempuan atau 22% dari jumlah populasi. Tidak dipisahkannya jenis kelamin karena pada hakekatnya para guru tersebut berkemampuan sama dalam hal melakukan kegiatan PBM di tingkat SD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kesimpulan secara umum dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi dalam seluruh mata pelajaran belum berjalan optimal, hal ini terbukti dari persentase yang diperoleh sebesar 45,27%. Secara pelaksanaan supervisi yang menyangkut aspek pengelolaan pembelajaran berada dalam kategori cukup yaitu 56,37%. Pelaksanaan supervisi yang menyangkut aspek peningkatan kemampuan akademik guru dalam pembelajaran berada dalam kategori cukup yaitu 41%. Pelaksanaan supervisi yang menyangkut aspek pengembangan profesi sebagai guru mata pelajaran oleh supervisor berada dalam kategori kurang yaitu 35,97%.

LATAR BELAKANG MASALAH

Supervisi pendidikan sebagai suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan manajemen pendidikan perlu diupayakan secara simultan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Bukti yang menunjukkan bahwa supervisi menjadi bagian dari manajemen pendidikan nasional adalah terdapatnya bab khusus mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Oleh karena supervisi pendidikan mempunyai kedudukan strategis dan penting dalam manajemen pendidikan, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berupaya secara terus menerus menjadikan para pelaksana supervisi pendidikan sebagai tenaga yang profesional.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisasi tenaga pengawas pendidikan, maka dikeluarkan sebuah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: 118 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Standar kinerja dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Perubahan kebijakan yang berkaitan dengan supervisi pendidikan tersebut dalam pelaksanaannya tidak akan dapat menghindarkan diri dari berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi terutama berkaitan dengan kondisi nyata dilapangan bahwa pengawas

sekolah memiliki citra yang kurang baik. Hal ini sebagai dampak dari pelaksanaan tugas yang hanya menekankan pada aspek administratif dari pada substantif pengajaran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Djailani (1998) membuktikan bahwa "Pembinaan profesional guru oleh pengawas di SD hanya mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah dan bimbingan rutin."

Jadi, faktor penghambat dalam efektifitas pembinaan guru lebih pada faktor pribadi; yakni ketidakmampuan para pengawas pendidikan untuk melaksanakan pembinaan profesional guru secara efektif karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan bahkan kepribadiannya. Dari hasil pengamatan dilapangan, pernyataan ketua KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah) se Kab. Sumedang bahwa yang memperburuk citra dan kinerja pengawas sekolah adalah latar belakang pengawas yang tidak menguasai bidangnya serta tidak cukup memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai gambaran berupa analisis kondisi berkenaan dengan pelaksanaan supervisi guru mata pelajaran di SD oleh pengawas sekolah di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

Pertama, beberapa kenyataan di bidang mata pelajaran di sekolah-sekolah menunjukkan bahwa, masih ada para pengawas sekolah (pelaksana supervisi mata pelajaran), entah itu Kepala Sekolah dan Pengawas yang memahami supervisi identik dengan penilaian atau inspeksi terhadap para guru. Hal ini karena dalam praktik

pelaksanaan supervisinya, mereka cenderung menilai dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh guru, atau mencari-cari kekurangan dan kesalahan para guru. Seringkali kekurangan ini diangkat sebagai temuan. Semakin banyak temuan, maka dianggap semakin berhasil para pelaku supervisi tersebut.

Kedua, pelaksanaan supervisi tidak lebih dari hanya sekedar petugas yang sedang menjalankan fungsi administrasi, mengecek apa saja ketentuan yang sudah dilaksanakan dan yang belum. Karena itu, bobot kegiatannya sangat bersifat administratif. Hasil kunjungan itu kemudian disampaikan sebagai laporan berkala, misalnya bulanan, yang ditujukan kepada atasannya.

Ketiga, lebih parah lagi, yakni banyak di antara petugas supervisi yang kurang memahami hakikat dan substansi pembelajaran di SD. Mereka tidak paham tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sebenarnya. Sehingga para pengawas itu tidak dapat memberikan arahan, contoh, bimbingan, dan saran agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya.

Keempat, rasio jumlah pengawas sekolah dan jumlah sekolah secara kuantitatif telah memenuhi ketentuan standar minimal mengenai jumlah sekolah yang harus diawasi. Pada tahun 2006, jumlah pengawas sekolah TK/SD di Kabupaten Sumedang sebanyak 15 orang yang tersebar di lima wilayah, yang masing-masing wilayah terdiri dari 5 Kecamatan dengan rasio rata-rata antara pengawas dengan sekolah adalah 1 : 21. Namun secara kualitatif bila dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah binaan yang sangat beragam, akan mempengaruhi rasio jumlah tersebut. Selain itu, latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan terakhir yang sangat bervariasi, menunjukkan beragamnya kemampuan serta motivasi kinerja pengawas sekolah TK/SD. Hal tersebut perlu mendapat perhatian para pembina struktural pada tingkat regional, untuk meningkatkan kemampuan para pengawas.

Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya kebijakan pemerintah demi terwujudnya pengawas yang bermutu dan kinerja SDM guru sekolah dasar yang diharapkan. Dalam pengelolaan SDM sekolah dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sangat bertanggung jawab dalam hal pembinaannya. Kepala Sekolah dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam implementasinya kesemuanya itu akan dipengaruhi oleh model pembinaan guru yang dilakukan kepala sekolah maupun pengawas pendidikan Kabupaten Sumedang. Kondisi itulah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai model pembinaan terhadap guru yang berupa bantuan layanan supervisi pengajaran dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di SD.

PERUMUSAN MASALAH

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, secara umum masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi supervisi akademik terhadap proses pembelajaran di SD saat ini yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pengawas dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sekolah.

Untuk selanjutnya penulis rumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar kompetensi pengelolaan pembelajaran oleh guru mata pelajaran di SD?

2. Seberapa besar kompetensi akademik guru mata pelajaran di SD?
3. Seberapa besar kompetensi pengembangan profesi guru mata pelajaran di SD?
4. Seberapa besar implementasi supervisi akademik guru mata pelajaran terhadap peranan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai pengawas pengajaran?

TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan baru mengenai implementasi supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas terhadap seluruh mata pelajaran yang diajarkan di SD. Temuan tersebut dapat dijadikan landasan dalam upaya mengembangkan mutu SDM guru agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji pemahaman kepala sekolah dan pengawas dalam pembelajaran terhadap peranannya sebagai pengawas sekolah.
2. Mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji pemahaman guru terhadap peranan kepala sekolah dan pengawas sebagai pengawas sekolah.
3. Mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengkaji hubungan antara guru dengan kepala sekolah dan pengawas pembelajaran sebagai pengawas sekolah dalam upaya memperbaiki pembelajaran di SD.
4. Menggambarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas pembelajaran sebagai pengawas sekolah dalam upaya memperbaiki pembelajaran di SD.
5. Mengetahui format yang digunakan kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan pengawasan akademik.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji substansi pengembangan SDM, khususnya manajemen SDM guru dan memperkaya bidang akademik tentang pelaksanaan supervisi mata pelajaran di SD.

Manfaat Praktis

Dari aspek pengembangan teori, hasil penelitian ini merupakan bahan bagi pengembangan ilmu manajemen SDM pendidikan khususnya guru sekolah dasar. Manfaat ini akan lebih dirasakan oleh lembaga-lembaga seperti; Kampus Sumedang sebagai lembaga yang meluluskan calon guru SD.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan oleh UPI Kampus Sumedang dalam pengembangan program peningkatan mutu SDM guru-guru sekolah dasar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan analisis data yang sudah terkumpul yang

diperoleh dari hasil catatan lapangan tersebut diorganisir secara cermat untuk menjawab berbagai persoalan yang diajukan yaitu: (1) pelaksanaan pengolahan pembelajaran, (2) pelaksanaan akademik pembelajaran, (3) pelaksanaan pengembangan profesi guru, (4) pelaksanaan supervisi pembelajaran di SD.

Pada bagian akhir dari Bab IV akan dipaparkan mengenai konsolidasi teori yang pada akhirnya akan diperoleh sebuah temuan teori, temuan penelitian, serta kontribusi hasil penelitian bagi pelaksanaan supervisi pembelajaran di SD.

1. Pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penulis menganalisisnya untuk mengetahui besaran persentase dalam pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di SD se

Tabel 1: Hasil Perhitungan Persentasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran SD di Kabupaten Sumedang

Komponen	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Keterangan
Pengelolaan	2.892	5.130	56,37%	Cukup

Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

2. Pelaksanaan akademik pembelajaran

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penulis menganalisisnya untuk mengetahui besaran persentase dalam pelaksanaan akademik pembelajaran di SD se

Tabel 2: Hasil Perhitungan Persentasi Pelaksanaan Akademik Pembelajaran SD di Kabupaten Sumedang

Komponen	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Keterangan
Akademik	3.200	7.830	41%	Cukup

Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

3. Pelaksanaan pengembangan profesi guru

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penulis menganalisisnya untuk mengetahui besaran persentase dalam pelaksanaan pengembangan profesi guru di SD se

Tabel 3: Hasil Perhitungan Persentasi Pelaksanaan Pengembangan Profesi Guru SD di Kabupaten Sumedang

Komponen	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Keterangan
Pengembangan Profesi	874	2.430	35,97%	Kurang

Kabupaten Sumedang.

4. Pelaksanaan supervisi pembelajaran

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, penulis menganalisisnya untuk mengetahui besaran persentase dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran di SD se

Tabel 4: Hasil Perhitungan Persentasi Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran SD di Kabupaten Sumedang

Komponen	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Keterangan
Supervisi	6.967	15.390	45,27%	Cukup

Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Jadi pelaksanaan supervisi pembelajaran yang dilaksanakan di SD saat ini sebesar 45,27% artinya pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagai pembina dalam meningkatkan guru mata pelajaran masuk katagori cukup, baik pelaksanaan manajemen kelas, akademik, maupun pengembangan profesi guru. Komponen administratif berupa perencanaan pembelajaran selalu menjadi prioritas dalam melakukan pengawasan ke sekolah. Pembinaan yang diberikan terhadap guru SD sangat tidak jelas, karena pengawasannya kurang memahami apa yang seharusnya disupervisi. Kondisi ini semakin diperparah dengan latar belakang pengawas yang sama sekali tidak memahami materi (*content*) pembelajaran, sehingga guru SD tidak ada fasilitas yang dapat dijadikan tempat "curhat".

Jadi, pelaksanaan supervisi pembelajaran saat ini di SD hanya bersifat administrative. Oleh karena itu, supaya *supervisor* dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas harus memiliki perencanaan terhadap tugas pokoknya.

Program peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar (SD) dapat dicapai bila kegiatan proses belajar mengajar di kelas dapat berlangsung dengan baik, efektif dan efisien. Hal tersebut dapat terlaksana apabila ditunjang dengan adanya upaya peningkatan kemampuan guru mata pelajaran dalam mengelolanya. Upaya peningkatan kemampuan guru tersebut dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas melalui pembinaan yang dilaksanakan secara teratus dan berkesinambungan.

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis edukatif pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Menengah.

Sejak diberlakukannya ketentuan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah pada tanggal 1 November 1996, kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional dan angka kreditnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 020/U/1998, tugas pengawas sekolah mengalami beberapa perubahan sehingga perlu disikapi secara bijaksana dan tepat.

Tugas pokok pengawas sekolah menurut ketentuan jabatan fungsional pengawas sekolah adalah melaksanakan "Penilaian dan Pembinaan" terhadap satuan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya, dengan penekanan pada proses pembelajaran. Sedangkan tugas yang biasa dilaksanakan oleh pengawas sekolah meskipun tidak termasuk katagori tugas pokok yang memperoleh nilai angka kerdit dikelompokkan sebagai kegiatan rutin.

Pengawas sekolah dituntut untuk mampu menjabarkan tugas rutin dalam sebuah kerangka pengelolaan strategi pelaksanaan tugas (manajemen) dengan memanfaatkan rentang waktu yang tersedia. Ada tiga hal pokok yang penulis temukan dalam mekanisme pengawas oleh supervisor di tingkat SD, yaitu: (1) pembinaan dalam hal manajemen pembelajaran, (2) peningkatan kemampuan akademik guru, dan (3) pengembangan profesi guru sekolah dasar. Mengacu pada hasil penelitian pengawas belum melakukan tugasnya secara optimal dalam upaya meningkatkan kinerja guru sekolah dasar. Guru belum merasakan adanya pembinaan yang signifikan yang

dilakukan oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya, sehingga peningkatan yang didapat melalui pelaksanaan supervisi belum mampu mengangkat citra guru sekolah dasar.

Padahal mengacu pada tugas pokok pengawas sekolah tingkat SD berdasarkan pada SK Mendikbud Nomor 020/U/1998 dan wajib dilaksanakan oleh setiap pengawas sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program semester pengawas sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Melaksanakan penilaian, pengelolaan, dan analisis data hasil belajar siswa dan kemampuan guru pada semua sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa.
4. Melaksanakan analisis, yaitu: (1) Analisis sederhana hasil belajar siswa dengan cara memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar siswa. (2) Melaksanakan analisis komprehensif hasil belajar siswa dengan memperhitungkan berbagai faktor sumber daya pendidikan yang kompleks termasuk korelasi kemampuan guru dengan hasil belajar siswa.
5. Melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga lainnya di sekolah, melalui kegiatan sebagai berikut: (1) Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan PBM/bimbingan siswa. (2) Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru dalam melaksanakan PBM. (3) Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada pimpinan instansi terkait. Dan (4) Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah.
6. Menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawas, berupa: (1) Menyusun hasil pengawasan pada setiap sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya setiap semester.
7. Melaksanakan pembinaan lainnya di sekolah selain PBM adalah sebagai berikut: (1) Membina pelaksanaan pengelolaan sekolah. (2) Memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan siswa baru. (3) Memantau dan membimbing pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah. (4) Memantau dan membimbing pelaksanaan Ujian Kemampuan. (5) Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ametembun. (1981). *Supervisi Pendidikan: Penutun Bagi Para Penilik, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru-guru*. Bandung: Percetakan Suri.
- Bondi Yosep dan Wiles John, (1988), *Supervision: A Guide to Practice*, Colombus: Charles E Merrill Publishing, Co
- Dedi Supardi dan Fasli Jalal, (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Kerjasama Depdiknas, Bapenas, dan Adicita Karya Nusa.
- Depdibud. (1992), *Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Depdibud. (1996). *Pedoman Kerja Pelaksanaan Supervisi*. Jakarta Ditjen Dikdasmen.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dharma, Agus. (2001). *Manajemen Supervisi*. Edisi Ke-4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Enco, Mulyasa. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Enco, Mulyasa, (2006). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Engkoswara, (1987), *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*, Jakarta, Depdibud, Ditjen Dikti, P2LPTK.
- Fakry Gaffar, (1987), *Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Depdibud.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ke-2 Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Oemar Hamalik, (2002), *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Retno Sriningsih Satmiko, (1992), *Pengembangan Guru dalam Perfektif Budaya*, Semarang: IKIP.